

## Hani Fachrul Razi Serahkan Bantuan Kemenag Peduli Banjir di Jakarta

Jakarta (Kemenag) --- Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Hani Fachrul Razi menyerahkan Bantuan Kemenag Peduli Dampak Banjir di Komplek Perumahan Depag, Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada warga terdampak banjir Komplek Perumahan Depag di Masjid Daarul Muttaqien.

"Atas nama keluarga besar Kemenag, saya menyampaikan rasa prihatin terhadap banjir yang melanda Jabodetabek dan sekitarnya. Salah satunya yang menimpa keluarga besar Kemenag di Komplek Depag Ini," kata Hani Fachrul Razi, di Jakarta, Rabu (15/01).

"Sebagai rasa tali kasih, hari ini kami hadir di sini untuk memberikan bantuan kepada keluarga Kemenag yang terdampak banjir. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menghadapi cobaan ini," sambunganya.

Hadir mendampingi Penasihat DWP Kemenag, Ketua DWP Kemenag beserta jajaran, Kepala Biro Umum Kemenag dan Kepala Biro Keuangan. Bantuan yang diberikan berupa uang Rp1 juta dan paket sembako.

Hani Fachrul Razi juga menyerahkan bantuan uang tunai Rp5 juta kepada pengurus Masjid Daarul Muttaqien Komplek Depag Kedaung Kaliangke. Bantuan untuk mesjid diterima Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Daarul Muttaqien, Farhan.

Usai menyerahkan bantuan, Hani Fachrul Razi bersama pengurus DWP Kemenag meninjau sejumlah rumah terdampak banjir yang tak jauh dari Masjid Daarul Muttaqien.

Kepala Biro Umum Kemenag sekaligus Ketua Tim Kemenag Peduli menyatakan sebagai bentuk empati dan rasa peduli, keluarga besar Kemenag secara sukarela menyumbangkan bantuan terkait bencana banjir.

"Alhamdulillah sumbangan sukarela terkumpul 156 juta dalam dua minggu. Ini adalah imbauan Menag saat pembukaan HAB Kemenag lalu," kata Syafrizal.

"Begitu juga DWP Kemenag yang menghimpun dana 15 juta dan 100 paket sembako yang diserahkan hari ini," tuturnya.

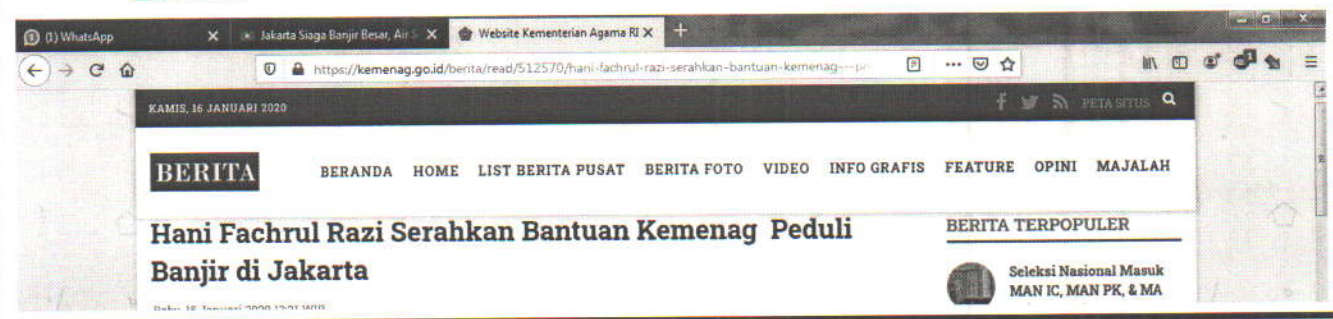
Syafrizal menambahkan, setiap ada musibah dan bencana alam ASN Kemenag selalu bergotong royong bahu membahu yang dinamai dengan sumbangan suka rela penuh rasa setia kawan. Bantuan dari keluarga besar ASN Kemenag tersebut sudah disalurkan kepada korban terdampak banjir di sejumlah tempat di Jakarta dan sekitarnya. Seperti di Komplek Wisma Tajur Cileduk, Komplek Kemenag Citayam dan Komplek Depag Kedaung Kaliangke.

Sumber : -

Penulis : benny andriyos

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512570/hani-fachrul-razi-serahkan-bantuan-kemenag---peduli-banjir-di-jakarta->



## STAIN Takengon dan Sorong Segera Bertransformasi Menjadi IAIN

Jakarta (Kemenag) --- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Gajah Putih Takengon dan STAIN Sorong akan segera beralihstatus atau bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Kepastian transformasi ini diketahui setelah keluarnya persetujuan permohonan ijin prakarsa penyusunan atas rancangan perpres tentang IAIN Sorong dan IAIN Gajah Putih Takengon dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.

Sebagai tindak lanjut, Kemenkumham menggelar Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang IAIN Takengon di Jakarta, Selasa (14/01). Hadir, Asisten Deputi Asesmen dan Kordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tatalaksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Men PAN&RB, R. Roro Vera Yuwanti Susilastuti, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemenag, Afrizal Zen. Hadir juga, perwakilan dari Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, BKN, Ketua STAIN Takengon, serta tim Subdit Kelembagaan dan Kerjasama Diktis.

Direktur Harmonisasi Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Bunyamin menyampaikan, hasil harmonisasi akan menjadi dasar untuk penetapan Perpres terkait dengan perubahan bentuk STAIN menjadi IAIN.

Sebagai tindak lanjut, Direktur Diktis Arskal Salim meminta kepada pimpinan dua STAIN untuk segera melakukan percepatan penguatan Sumber Daya Manusia khususnya bagi para dosen yang sedang menjalankan tugas belajar. "Mereka harus segera lulus dan kembali ke kampus untuk bertugas dalam rangka mengamalkan ilmunya dan tentu untuk meningkatkan mutu dan kualitas lembaga," jelas Arskal Salim.

Ketua STAIN Takengon Zulkarnain mengatakan bahwa saat ini kampusnya memiliki 36 dosen yang sedang menyelesaikan pendidikan S3, di dalam maupun Luar Negeri. "Kami berharap semoga transformasi ini akan berdampak positif terhadap peningkatan mutu dan kualitas lembaga serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh," jelas Zulkarnain. (Lip)

Sumber : Diktis  
 Penulis : Kontri  
 Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512571/stain-takengon-dan-sorong-segera-bertransformasi-menjadi-iaian>



## Jelang Alih Status, STAIN Takengon Segera Diperkuat Puluhan Doktor

Takengon (Kemenag) --- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Gajah Putih Takengon, Aceh akan segera diperkuat dosen berkualifikasi doktor. Pasalnya, banyak para dosen STAIN Takengon yang sebentar lagi menyelesaikan kuliah doktoralnya.

“Pada Tahun Akademik 2020 ini, paling tidak 18 dosen yang menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Doktor,” terang Ketua STAIN Gajah Putih Takengon Zulkarnain usai mengikuti Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang IAIN Takengon di Jakarta, Selasa (14/01).

“Ada 10 dosen kuliah doktoral untuk program studi Pendidikan Islam dan dua dosen pada program studi Ekonomi Syaria’ah. Mereka kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Semuanya sudah selesai proses sidang tertutup. Enam dosen lainnya juga harus menyelesaikan S3-nya dan kembali bertugas tahun ini,” lanjutnya.

Zulkarnain menambahkan, program doktoral menjadi upaya STAIN Takengon untuk memperkuat SDM dosen. Selain dalam rangka memperkuat kapasitas keilmuan, program ini juga untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam rangka alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

“Proses alih status sudah hampir selesai. Persetujuan permohonan ijin prakarsa penyusunan atas rancangan Perpres tentang IAIN Gajah Putih Takengon dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi sudah keluar,” jelasnya.

“Kami berharap semoga transformasi ini akan berdampak positif terhadap peningkatan mutu dan kualitas lembaga serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh,” tandasnya.

Terpisah, Direktur Pascasajana UIN Sumatera Utara Syukur Kholil mengapresiasi mahasiswa S3 STAIN Gajah Putih Takengon. Menurutnya, mereka ulet dan fokus dalam mengikuti proses perkuliahan.

"Kita apresiasi mahasiswa S3 dosen STAIN Gajah Putih mereka cukup ulet dan kerja keras dalam proses perkuliahan juga dalam proses menyelesaikan Disertasi mereka," ujarnya.

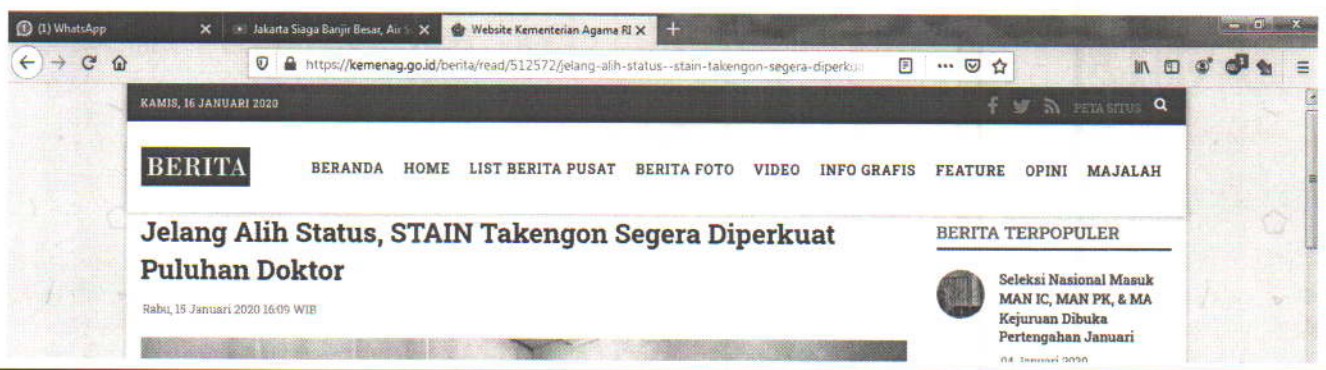
Selain 18 dosen yang akan menyelesaikan kuliahnya dan kembali bertugas tahun ini, ada 18 dosen lainnya yang masih menjalani program Doktoral pada sejumlah universitas, dalam dan luar negeri. Jadi total ada 36 dosen STAIN Takengon yang sedang kuliah program doktoral.

Sumber : STAIN Takengon

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

Sumber : <https://kemenag.go.id/berita/read/512572/jelang-alih-status--stain-takengon-segera-diperkuat-puluhan-doktor>



## Bertemu WNI Imam Masjid di Dubai, Menag Pesan Jaga Nama Baik Indonesia

Jakarta, airmagz.com – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi bertemu dengan 3 (tiga) warga negara Indonesia (WNI) yang tengah bertugas sebagai imam masjid di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Pertemuan yang diinisiasi KJRI Dubai itu, dilakukan sehari setelah Menag mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu Shaikh Muhammed Ben Zayed (MBZ), di Istana Kepresidenan Qasr al-Wathan, Abu Dhabi, Minggu (12/1).

Dalam kesempatan itu Menag meminta agar ketiga WNI itu menjalankan tugas dengan baik karena ini amanah. “Kenalkan corak keberislaman di Indonesia kepada dunia. Jaga nama baik bangsa Indonesia,” pesan Menag, di Dubai, Senin (13/1) malam.

Menag juga berpesan agar para imam bisa menampilkan Islam yang ramah dan toleran. Sebab, Uni Emirat Arab termasuk negara dengan tingkat tasamuh yang tinggi. “Islam di sini terlihat indah dengan keramahan warga UEA dan jaminan rasa aman,” kata Menag.

Menag mengaku senang mendengar kisah tentang kinerja baik para imam, termasuk tentang kemampuan mereka berkhotbah, baik dalam Bahasa Arab maupun Inggris. “Kami akan terus tingkatkan sinergi. Insha Allah ke depan akan kami kirimkan kembali 100 imam,” tandasnya.

Ketiga imam masjid yang berasal dari Indonesia yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Harir Ridwan, M. Munir, dan Andy. Mereka hadir dengan istri dan anak-anak. Sementara Menag didampingi oleh Sekjen Kemenag M Nur Kholis, dan dari pihak KJRI Dubai, ada Pensusbud Yunita beserta jajarannya.

Indonesia dan UEA telah menjalin kerjasama dalam urusan agama Islam dan wakaf. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Menteri Agama Fachrul Razi dan Ketua Otoritas Umum Bidang Urusan Islam dan Wakaf UEA Mohammed bin Matar al Kaabi. Penandatanganan MoU disaksikan oleh Presiden Joko Widodo bertemu Shaikh Muhammed Ben Zayed. (IMN/Setkab.go.id)

Sumber : <https://www.airmagz.com/53871/bertemu-wni-imam-masjid-di-dubai-menag-pesan-jaga-nama-baik-indonesia.html>

The image is a screenshot of a web browser displaying the article on the airmagz.com website. The browser's address bar shows the URL: https://www.airmagz.com/53871/bertemu-wni-imam-masjid-di-dubai-menag-pesan-jaga-nama-baik-indonesia.html. The website's navigation menu includes: HOME, HEADLINES, NEWS UPDATE, TRAVEL, OPINION, PEOPLE, LIFESTYLE, TIPS & TRICK, SPECIAL REPORT, EKONOMI & BISNIS, and FOTO. The article title is "Bertemu WNI Imam Masjid di Dubai, Menag Pesan Jaga Nama Baik Indonesia" by Iman Achdiat, dated 15 Jan 2020. The main image shows a group of men in a meeting. To the right of the article is an advertisement for airmagz.com with the slogan "We're Moving" and contact information for their office in Jakarta. Below the advertisement is a promotional poster for the "MALAYSIA WORLD FINALS" held from 13-15 December 2019, featuring the EWC logo and a car image.

## Tiga WNI Dipercaya Jadi Imam Masjid Dubai, Ini Pesan Menag RI

**TIMESINDONESIA, UEA** – Menteri Agama RI (Menag RI) Fachrul Razi bersilaturahmi dengan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipercaya menjadi imam masjid di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Senin (13/1/2020) waktu setempat.

Ketiga imam masjid dari Indonesia itu masing-masing adalah Harir Ridwan, M Munir dan Andy. Pertemuan yang diinisiasi KJRI Dubai ini dilakukan sehari setelah Menag mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu Shaikh Muhammed Ben Zayed (MBZ) di Istana Kepresidenan Qasr al-Wathan, Abu Dhabi.

Dalam silaturahmi ini, Menag meminta agar ketiganya menjalankan tugas dengan baik karena ini amanah. "Kenalkan corak keberislaman di Indonesia kepada dunia. Jaga nama baik bangsa Indonesia," pesannya.

Menag juga berpesan agar para imam bisa menampilkan Islam yang ramah dan toleran. Sebab, Uni Emirat Arab termasuk negara dengan tingkat tasamuh yang tinggi. "Islam di sini terlihat indah dengan keramahan warga UEA dan jaminan rasa aman," imbuhnya.

Menag RI mengaku senang mendengar kisah tentang kinerja baik para imam tersebut, termasuk tentang kemampuan mereka berkhotbah, baik dalam Bahasa Arab maupun Inggris. "Kami akan terus tingkatkan sinergi. Insya Allah ke depan akan kami kirimkan kembali 100 imam," tukas Fachrul Razi. (\*)

Sumber : <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/246904/tiga-wni-dipercaya-jadi-imam-masjid-dubai-ini-pesan-menag-ri>



## Kemenag akan Cabut Moratorium Pendaftaran Izin Travel Umrah

**Merdeka.com** - Kementerian Agama tengah mempertimbangkan untuk melakukan pencabutan moratorium izin pendaftaran Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Rencananya proses pengajuan izin baru nantinya akan melalui sistem online yang tengah difinalisasi.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Nizar mengatakan, sistem online diharapkan akan memudahkan masyarakat dan prosesnya lebih terbuka dalam pengajuan izin baru.

"Moratorium kita targetnya tanggal akhir Januari kita buka, sistemnya kini menggunakan online karena kita menghindari sistem tatap muka supaya kesan yang selama ini di lontarkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa terhindari," katanya seperti dilansir dari kemenag.go.id, Rabu (15/1).

Dalam beberapa bulan terakhir, Ditjen PHU tengah mengintensifkan pengawasan dan pembinaan terhadap Biro Perjalanan Wisata yang tidak memiliki izin sebagai PPIU. Sejumlah BPW yang terbukti tidak memiliki izin sebagai PPIU telah diperiksa dan diminta untuk menghentikan aktivitasnya membuka pendaftaran jemaah umrah.

Pengawasan dan pembinaan ini sekaligus sebagai sarana sosialisasi UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Berbeda dengan UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji yang hanya memuat empat pasal tentang umrah, UU 8/2019 lebih detail, ada lebih 20 pasal yang membahas tentang umrah.

Salah satunya, pasal 122 yang mengatur, setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jemaah umrah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar.

Pengawasan dan pembinaan di lapangan yang dilakukan Tim Satgas Umrah mendapat apresiasi dari Sapuhi. Pengurus Sapuhi, Riza Pahlevi mengaku telah mengultimatum anggotanya agar menghentikan penjualan paket umrahnya jika sampai 31 Januari belum melakukan proses izin menjadi cabang dari travel utamanya.

"Kemarin sudah ada sidak. Kami sudah dapat informasinya, salah satunya adalah anggota kami. Setelah Undang-Undang dan Kep Dirjen keluar, kita langsung edukasi semua anggota kita untuk taat aturan. Setelah hasil sidak, kita keluarkan ultimatum per 31 Januari itu tidak boleh semuanya jualan umrah," tutup Nizar.

[fik]

Sumber : <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-akan-cabut-moratorium-pendaftaran-izin-travel-umrah.html>

The screenshot shows a web browser displaying a news article. The article title is "Kemenag akan Cabut Moratorium Pendaftaran Izin Travel Umrah". The date is "Rabu, 15 Januari 2020 10:49" and the reporter is "Fikri Faqih". There is a large image of the Kaaba in Mecca. On the right side, there is a sidebar with a profile for "Reynhard Sinaga" and several article teasers, including "Dampak Psikis Apa yang Mungkin Dialami Korban kejahatan Seksual oleh Reynhard Sinaga?", "VIDEO: Penampakan Rumah Megah Keluarga Reynhard di Depok", and "Istana: Reynhard Sinaga Mencoreng Wajah".

**Akhir Januari Kemenag Akan Cabut Moratorium Pendaftaran Izin Travel Umroh**

**Jakarta** - Kementerian Agama (Kemenag) akhir Januari ini berencana mencabut moratorium izin pendaftaran Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Proses pengajuan izin baru nantinya melalui sistem online yang sedang memasuki tahap akhir (finalisasi).

"Moratorium kita targetnya tanggal Akhir Januari kita buka, sistemnya kini menggunakan online karena kita menghindari sistem tatap muka supaya kesan yang selama ini di lontarkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa terhindari," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Nizar, dalam siaran pers yang dilihat dari situs Kemenag.go.id.

Sistem online diharapkan bisa mempermudah masyarakat mengajukan izin PPIU karena prosesnya yang lebih terbuka. Saat ini, Kemenag mengintensifkan pengawasan dan pembinaan terhadap Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang tidak memiliki izin sebagai PPIU. Sejumlah BPW yang tidak memiliki izin sebagai PPIU telah diperiksa dan diminta menghentikan aktivitasnya melayani jamaah umroh.

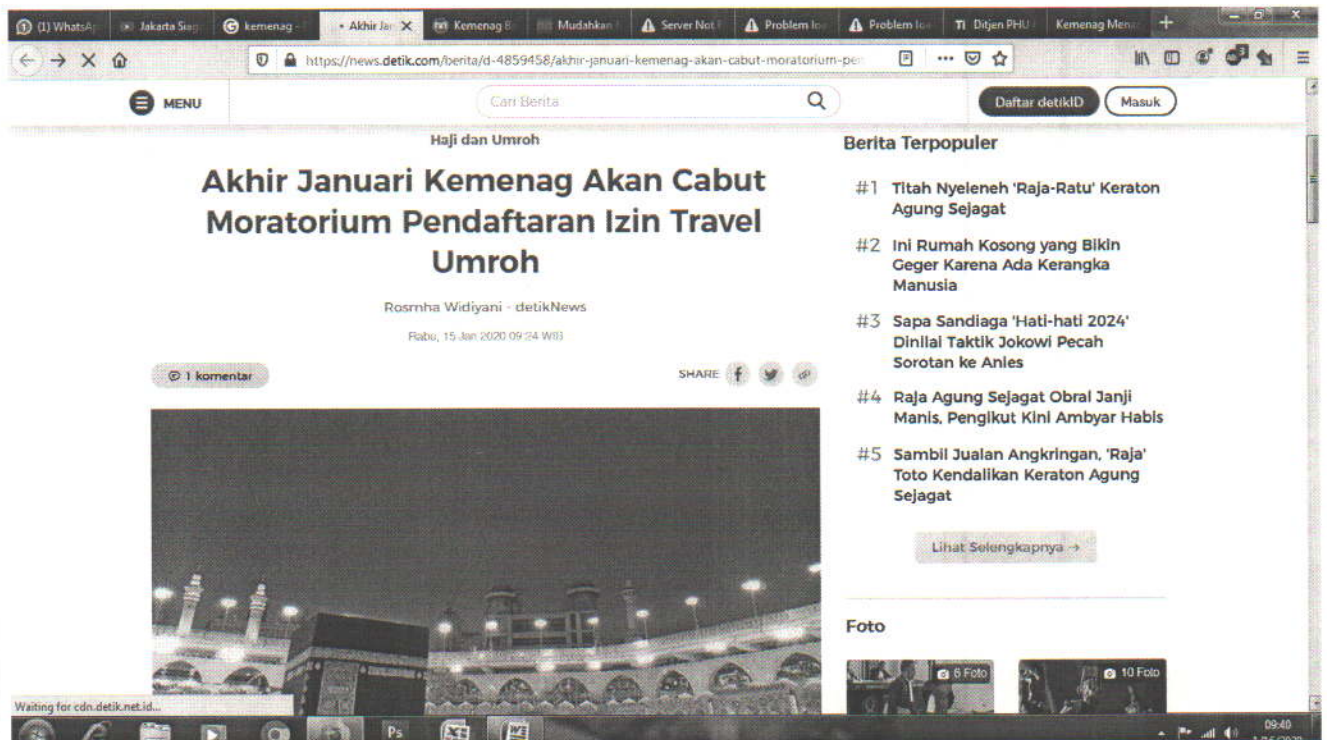
Pengawasan dan pembinaan sekaligus sarana sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Aturan ini lebih detail membahas umroh dengan 20 pasal daripada UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji yang hanya punya empat pasal tentang umroh.

UU Nomor 8 tahun 2019 pasal 122 menyatakan, tiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jamaah umroh akan mendapat sanksi. Mereka yang terbukti melakukan tindakan tersebut akan dipidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 6 miliar.

*Kumpulan berita harian Hikmah terbaru dan terlengkap seputar Islam dan kisah inspiratif bisa dibaca di sini.*

(row/erd)

Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-4859458/akhir-januari-kemenag-akan-cabut-moratorium-pendaftaran-izin-travel-umroh>



## Kemenag Bakal Cabut Moratorium Izin Penyelenggara Umrah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama bakal mencabut moratorium izin pendaftaran Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar, proses pengajuan izin baru nantinya akan melalui sistem online yang saat ini tengah difinalisasi.

Sistem online diharapkan akan memudahkan masyarakat dan prosesnya lebih terbuka.

“Akhir Januari kita buka, sistemnya kini menggunakan online karena kami menghindari sistem tatap muka,” kata Nizar di Jakarta, Rabu (15/1).

Dalam beberapa bulan terakhir, Ditjen PHU tengah mengintensifkan pengawasan dan pembinaan terhadap Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang tidak memiliki izin sebagai PPIU.

Sejumlah BPW yang terbukti tidak memiliki izin sebagai PPIU telah diperiksa dan diminta untuk menghentikan aktivitasnya membuka pendaftaran jemaah umrah.

Pengawasan dan pembinaan ini sekaligus sebagai sarana sosialisasi UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Berbeda dengan UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji yang hanya memuat empat pasal tentang umrah, UU 8/2019 lebih detail, ada lebih 20 pasal yang membahas tentang umrah.

Salah satunya, pasal 122 menyebut, setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jemaah umrah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 6 miliar.

Pengawasan dan pembinaan di lapangan yang dilakukan Tim Satgas Umrah mendapat apresiasi dari Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi).

Pengurus Sapuhi, Riza Pahlevi mengaku telah mengultimatum anggotanya agar menghentikan penjualan paket umrahnya jika sampai 31 Januari belum melakukan proses izin menjadi cabang dari travel utamanya. (esy/jpnn)

Sumber : <https://www.jpnn.com/news/kemenag-bakal-cabut-moratorium-izin-penyelenggara-umrah?page=1>

The screenshot shows a news article on the jpnn.com website. The main headline is "Kemenag Bakal Cabut Moratorium Izin Penyelenggara Umrah". Below the headline is a sub-image of a Saudi Arabia Umrah permit document. The document contains the following text: "KINGDOM OF SAUDI ARABIA", "الملكيت العربية السعودية", "رقم : 2116621528", "مصدرها جاكرتا", "34/07/04 تاريخها", "05/13", "30 D 30 صلاحيتها يوم", "مدة الإقامة 30 يوم", "المتعهد له للخدمات العامة". To the right of the article is a "TERPOPULER" sidebar with a list of trending news items, including "Anies Sudah Terjebak, Padahal Pilpres Masih Jauh", "Survei Eksperimental: Warga Jakarta Dukung Anies, Tetapi Anggap Konsep Ahok Lebih Baik", "Tiongkok Sengaja Memancing RI Kerahian Kapal Perang ke Natuna", and "Nasib Benny".



## Mudahkan Masyarakat dengan Sistem Online, Kemenag Akan Cabut Moratorium Izin PPIU

**Moeslimchoice.** Saat ini Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag tengah mempertimbangkan untuk melakukan pencabutan moratorium izin pendaftaran Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Dirjen PHU, Nizar mengatakan, bahwa proses pengajuan izin baru nantinya akan melalui sistem online yang tengah difinalisasi. Sistem online diharapkan akan memudahkan masyarakat dan prosesnya lebih terbuka.

"Moratorium kita targetnya tanggal Akhir Januari kita buka, sistemnya kini menggunakan online karena kita menghindari sistem tatap muka supaya kesan yang selama ini di lontarkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa terhindari," tegas Nizar saat menerima pengurus Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) di Kantor Kemenag Lapangan Banteng Jakarta, Selasa (14/1).

Hadir juga, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M. Arfi Hatim serta jajaran eselon III dan IV Ditbina Umrah dan Haji Khusus.

Dalam beberapa bulan terakhir, Ditjen PHU tengah mengintensifkan pengawasan dan pembinaan terhadap Biro Perjalanan Wisata yang tidak memiliki izin sebagai PPIU. Sejumlah BPW yang terbukti tidak memiliki izin sebagai PPIU telah diperiksa dan diminta untuk menghentikan aktivitasnya membuka pendaftaran jamaah umrah.

Pengawasan dan pembinaan ini sekaligus sebagai sarana sosialisasi UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Berbeda dengan UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji yang hanya memuat empat pasal tentang umrah, UU 8/2019 lebih detail, ada lebih 20 pasal yang membahas tentang umrah.

Salah satunya, pasal 122 yang mengatur, setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jamaah umrah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 6 miliar.

Pengawasan dan pembinaan di lapangan yang dilakukan Tim Satgas Umrah mendapat apresiasi dari Sapuhi. Pengurus Sapuhi, Riza Pahlevi mengaku telah mengultimatum anggotanya agar menghentikan penjualan paket umrahnya jika sampai 31 Januari belum melakukan proses izin menjadi cabang dari travel utamanya.

"Kemarin sudah ada sidak. Kami sudah dapat informasinya, salah satunya adalah anggota kami. Setelah Undang-Undang dan Kep Dirjen keluar, kita langsung edukasi semua anggota kita untuk taat aturan. Setelah hasil sidak, kita keluarkan ultimatum per 31 Januari itu tidak boleh semuanya jualan umrah," tegasnya. [mel]

Sumber : <https://www.moeslimchoice.com/read/2020/01/15/31600/mudahkan-masyarakat-dengan-sistem-online-kemenag-akan-cabut-moratorium-izin-ppiu>

## Ditjen PHU Kemenag RI Pertimbangkan Cabut Moratorium Izin Pendaftaran PPIU

**TIMESINDONESIA, JAKARTA** – Ditjen PHU (Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah) Kementerian Agama tengah mempertimbangkan mencabut moratorium izin pendaftaran PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah).

Direktur Jendral PHU, Prof Dr Nizar Ali, M.Ag mengatakan, proses pengajuan izin baru nantinya akan melalui sistem online yang tengah difinalisasi. Sistem online diharapkan akan memudahkan masyarakat dan prosesnya lebih terbuka.

“Moratorium kita target akhir Januari kita buka. Sistemnya menggunakan online, karena kita menghindari sistem tatap muka supaya kesan yang selama ini dilontarkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa terhindari,” kata Nizar saat menerima pengurus Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) di Kantor Kemenag Lapangan Banteng Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M. Arfi Hatim dan jajaran eselon III serta IV Ditbina Umrah dan Haji Khusus Kemenag juga hadir dalam pertemuan itu.

Beberapa bulan terakhir, Ditjen PHU memang intensif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BPW (Biro Perjalanan Wisata) yang tidak memiliki izin sebagai PPIU. Bahkan belasan BPW yang terbukti tidak memiliki izin sebagai PPIU juga telah diperiksa dan diminta untuk menghentikan aktivitasnya membuka pendaftaran jemaah umrah.

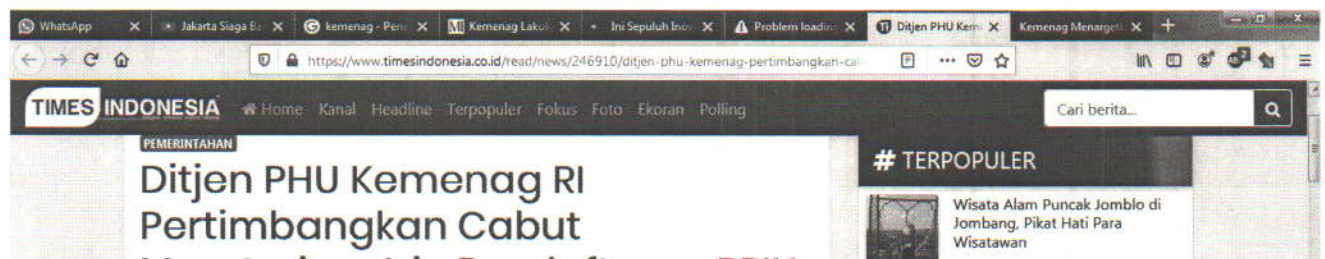
Pengawasan dan pembinaan ini sekaligus sebagai sarana sosialisasi UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Berbeda dengan UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji yang hanya memuat empat pasal tentang umrah, UU 8/2019 lebih detail, ada lebih 20 pasal yang membahas tentang umrah.

Salah satunya, pasal 122 yang mengatur, setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jemaah umrah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 6 miliar.

Pengawasan dan pembinaan di lapangan yang dilakukan Tim Satgas Umrah mendapat apresiasi dari Sapuhi. Pengurus Sapuhi, Riza Pahlevi mengaku telah mengultimatum anggotanya agar menghentikan penjualan paket umrahnya jika sampai 31 Januari belum melakukan proses izin menjadi cabang dari travel utamanya.

“Kemarin sudah ada sidak. Kami sudah dapat informasinya, salah satunya adalah anggota kami. Setelah Undang-Undang dan Kep Dirjen keluar, kami langsung mengedukasi semua anggota untuk taat aturan. Setelah hasil sidak, kami keluarkan ultimatum per 31 Januari itu tidak boleh semuanya jualan umrah,” tegasnya menanggapi rencana Ditjen PHU (Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah) Kementerian Agama mencabut moratorium izin pendaftaran PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah). (\*)

Sumber : <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/246910/ditjen-phu-kemenag-pertimbangkan-cabut-moratorium-izin-pendaftaran-ppiu>



**Kemenag Menargetkan 7 Tahun Mendatang PLHUT Hadir di Seluruh Indonesia**

**JPP MALANG** - Satu per satu Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) hadir di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Terbaru, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali meresmikan empat PLHUT pada empat Kankemeng Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Yaitu, PLHUT Kankemenag Kabupaten Malang, Kab. Sidoarjo, Kab. Tuban, dan Kab. Jember.

Nizar Ali berharap, tujuh tahun ke depan, PLHUT sudah hadir di seluruh Kab/Kota di Indonesia. "Semoga 5-7 tahun kemudian PLHUT sudah tersebar di seluruh Indonesia," ucap Nizar di Malang, Jawa Timur, Senin (13/01/2020).

Satu hal, Nizar Ali mengapresiasi pencapaian Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur karena bisa menyelesaikan pembangunan PLHUT tepat waktu. Karena jika tidak tepat waktu, maka program pelayanan dan pembangunan berikutnya akan menjadi terhambat.

Dirjen PHU berharap, keberadaan gedung pelayanan terpadu ini akan mempercepat dan memudahkan pengurusan haji dan umrah. "Insya Allah, dari 40 PLHUT yang akan dibangun pada tahun 2020, ada dua Kankemenag dari Jawa Timur yang kembali mendapatkan alokasi, yaitu Kabupaten Pamekasan dan Lumajang," jelas Nizar.

Gedung PLHUT itu terdiri atas dua lantai. Lantai pertama akan digunakan untuk ruang pelayanan jemaah. Sedangkan lantai 2 untuk ruang serbaguna yang dapat digunakan pula untuk kegiatan bimbingan manasik haji. Layanannya meliputi layanan informasi, pendaftaran, pembayaran melalui bank yang ditunjuk, serta layanan bimbingan manasik haji dan umrah.

Nizar juga berbagi solusi atas permasalahan tanah yang dialami sejumlah daerah dalam proses pembangunan PLHUT. Menurutnya, PLHUT mensyaratkan tanah atas nama Kementerian Agama, karena hal itu terkait dengan persyaratan aset. Demikian juga untuk pembangunan asrama haji, harus atas nama Kementerian Agama.

Bagi PLHUT yang masih terkendala tanah, agar mendiskusikannya dengan Pemda. Di Indramayu misalnya, setelah proses diskusi, akhirnya ada lahan seluas 11 hektare yang dihibahkan oleh Pemda ke Kemenag. Berbeda lagi di Banyumas, PLHUT dibangun di atas tanah/rumah dinas Kankemenag. "Pihak Kankemenag mengajukan ke Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, lalu dibangun PLHUT," kata Nizar Ali.

"Bisa juga dilakukan dengan pihak ketiga, hibah masyarakat dan lain-lain. yang penting atas namanya kementerian agama," tambahnya.

Hadir dalam peresmian ini, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis, Kabid PHU Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Jamal, Kepala Kankemenag Kab Malang Musta'in, Kepala Kankemenag Kab Sidoarjo Achmad Rofi'i, Kepala Kankemenag Kab Tuban Sahid, dan Kepala Kankemenag Kab Jember Busthami.

Kepala Kankemenag Kab Malang Musta'in yang mewakili tiga Kepala Kankemenag lainnya bersyukur atas peresmian PLHUT. Menurutnya, PLHUT Kankemenag Tuban dibangun dengan anggaran sebesar Rp1,8 miliar. Sementara Kankemenag Malang dengan anggaran Rp2,030 miliar, Sidoarjo, Rp2,057 miliar, dan Jember sebesar Rp2,616 miliar.

"Pembangunan telah dilaksanakan, berproses, dan selesai tepat waktu. Kami mengubah layout PLHUT dari yang awalnya di depan menjadi di belakang. Tanah pun kami luaskan dengan tambahan 26 meter," ujar Musta'in.

"Ada 7 bank yang bekerjasama dengan Kemenag. Kami tempatkan di kantor haji kami. Alhamdulillah sekarang jemaah yang ingin mendaftar haji, tinggal bawa uang ke sini, tidak usah ke mana-mana. Bank ada 7 di dalam tinggal pilih, transaksi di situ. Setelah selesai, jemaah tinggal ke PLHUT untuk mengurus sisanya, kurang lebih setengah jam jemaah haji selesai melakukan pendaftaran. jadi alurnya dari perbankan, lalu ke PLHUT," lanjutnya.

"Kami berterima kasih. Saya mewakili Kabupaten Malang, Jember, Tuban, dan Sidoarjo akan memanfaatkan sebaik mungkin," tutupnya.(agm)

Sumber : <https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/340208-kemenag-menargetkan-7-tahun-mendatang-plhut->

## **Ini Sepuluh Inovasi Kemenag untuk Haji 2020**

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi jamaah haji, Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya untuk melakukan beragam inovasi. Dalam pelaksanaan ibadah haji 2020 Kemenag telah menyiapkan 10 inovasi.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menyebut, peningkatan kualitas haji tahun 2020 terus ditingkatkan. Peningkatan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi jamaah haji.

"Inovasi pertama yaitu kloter berbasis wilayah. Penyusunan pramanifes kloter dilakukan sedini mungkin untuk mengefektifkan bimbingan manasik di kecamatan," ujar Muhajirin Yanis dikutip di laman resmi Kemenag, belum lama ini.

Dengan ditetapkannya kloter berbasis wilayah, hal ini berdampak pula pada penetapan regu dan rombongan. Ke semuanya berbasis pada kecamatan asal jamaah.

Inovasi berikutnya adalah menyiapkan respon darurat di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna). Respons darurat ini sebagai bagian dari prosedur pusat krisis dengan melibatkan muassasah.

Termasuk dalam respon darurat ini adalah Operasi Standar (SOP) manajemen mitigasi saat ada bencana. Akan dilakukan integrasi alokasi petugas Armuzna pada 2019 menjadi petugas pendukung.

Inovasi ketiga yakni pelayanan terpadu dan sistem pelaporan. Kemenag akan mengefektifkan pelayanan terpadu di tingkat Daker, utamanya Daker Makkah dan Madinah.

"Kita lakukan penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi dengan siskohat," lanjutnya.

Keempat, kemenag akan memberikan makanan secara penuh bagi jamaah haji. Ada penambahan konsumsi pada masa puncak haji, yakni tiga hari sebelum dan dua hari sesudah Armuzna dengan model makanan siap saji.

Inovasi selanjutnya adalah manasik sepanjang tahun. Dengan pelaksanaan program ini, diharap dapat menambah pengetahuan jamaah terhadap ibadah haji yang baik dan benar. Termasuk di dalamnya manasik jamaah lansia serta yang sakit.

Kementerian Agama juga melakukan inovasi pada proses pembuatan visa. Untuk mempersingkat waktu dan meningkatkan efisiensi, proses ini dapat dilakukan di kantor wilayah Kemenag dan tidak perlu dikirim ke pusat.

"Ketujuh, Kemenag melakukan inovasi penomoran maktab. Pemberian nomor maktab di Armuzna disesuaikan dengan nomor maktab di Makkah yang berbasis zonasi," lanjut Muhajirin Yanis.

Berikutnya, Kemenag melakukan inovasi penyusunan regulasi. Dilakukan percepatan penyusunan regulasi teknis karena terbitnya UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Inovasi kesembilan adalah disediakannya non-teller dan non-tunai untuk pembayaran pelunasan haji dan penyediaan *living cost*. Kemenag tidak lagi memberikan biaya hidup dalam bentuk tunai. Nantinya jamaah akan menerima kartu debit yang sekaligus menjadi kartu identitas jamaah sebagai sarana transaksi.

Terakhir Kemenag melakukan perbaikan proses badal dan safari wukuf. "Perbaikan dilakukan dengan cara penyusunan prosedur dan regulasi bersama antara Kemenag dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," kata Muhajirin.

Sumber : <https://ihram.co.id/berita/q44sj5396/inisepuluhinovasikemenaguntukhaji2020>

## Kemenag Lakukan Mitigasi Potensi Radikalisme di Madrasah

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) bersama Setara Institute menggelar pelatihan penguatan pemahaman moderasi beragama. Pelatihan ini dilakukan untuk mitigasi potensi radikalisme di lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia.

Kegiatan yang diikuti sejumlah kepala madrasah, pengawas, dan guru mata pelajaran agama di madrasah se-Kabupaten/Kota Cirebon bertema Pencegahan dan penanganan radikalisme bagi kepala madrasah, pengawas, dan guru madrasah.

"Kementerian Agama secara kelembagaan berkomitmen sebagai garda terdepan moderasi beragama dan mencegah paham radikalisme di Tanah Air. Tutup rapat celah radikalisme dan juga tindakan korupsi," kata Sekretaris Itjen Kemenag, Muhammad Tambrin, kemarin.

Ia menyebutkan, konsentrasi terbesar aparatur sipil negara (ASN) Kemenag ada di madrasah sebab penting untuk memitigasi potensi-potensi yang terpapar radikalisme. "Madrasah sebagai ujung tombak pendidikan karakter generasi muda, hendaknya lebih intens mengampanyekan moderasi beragama," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Setara Institute, Ismail Hasani, menjelaskan kegiatan ini bertujuan agar kepala madrasah, pengawas, dan para guru memahami arti penting moderasi beragama. Penguatan pemahaman ini menjadi bagian dari upaya Kemenag dalam pencegahan tindakan intoleransi dan radikalisme, khususnya di lingkungan madrasah. "Di pelatihan ini, peserta dibekali wawasan terkait dengan kebinekaan, moderasi beragama, dan Islam yang rahmatan lil 'alamin oleh para fasilitator yang di antaranya terdiri dari auditor," jelas Ismail.

Melihat dari potensi radikalisme sekarang ini, ia merasa perlu terlibat langsung untuk memastikan radikalisme tak kian berkembang. "Beberapa tahun belakangan virus konservatisme dan pendangkalan berpikir cukup masif terjadi. Hal ini perlu kita antisipasi, di antaranya dengan pelatihan yang melibatkan pihak madrasah," pungkasnya. (Ifa/RO/H-1)

Sumber : <https://mediaindonesia.com/read/detail/283626-kemenag-lakukan-mitigasi-potensi-radikalisme-di-madrasah>

The screenshot shows a web browser displaying the article. The main headline is "Kemenag Lakukan Mitigasi Potensi Radikalisme di Madrasah" with a sub-headline "MI | Humaniora". Below the headline is a large graphic with the word "RADIKALISME" in a stylized, bold font. To the right of the main article, there are several other news snippets:

- Bintang Tenis Dunia Galang Dana untuk Kebakaran Australia** (OLAHRAGA) - Tennis Australia berharap perhelatan amal bertajuk Rally for Relief itu bisa mengumpulkan dana sebesar... (Kamis 16 Januari 2020, 09:45 WIB)
- DPD Dorong RI Kerja Sama dengan Selandia Baru soal Pariwisata** (POLITIK DAN HUKUM) - DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) mengapresiasi dukungan Uni Eropa atas berbagai kebijakan yang tengah dijalankan... (Kamis 16 Januari 2020, 09:40 WIB)
- Jokowi Ingatkan Sandiaga Hati-Hati di 2024** (POLITIK DAN HUKUM) - Dalam kesempatan itu, sebelum menyampaikan pidato, Kepala Negara sempat melontarkan pernyataan terkait... (Kamis 16 Januari 2020, 09:30 WIB)
- UU KPK tidak Lemahkan Penindakan Korupsi** (POLITIK DAN HUKUM) - Mengenai masalah teknis penyidikan dalam UU

# Kemenag Kaji Pangkas Uang Saku Jamaah Haji

● KIKI SAKINAH

**Jatah makan jamaah haji selama di Makkah bertambah menjadi 50 kali.**

JAKARTA — Besaran uang saku (*living cost*) yang akan diterima jamaah haji reguler mulai tahun ini kemungkinan akan berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, Kementerian Agama (Kemenag) sedang mengkaji kemungkinan untuk memangkas besaran uang saku (*living cost*), dari sebesar 1.500 riyal Arab Saudi atau Rp 5,4 juta menjadi 1.000 riyal Arab Saudi atau Rp 3,6 juta.

Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag, Maman Saepulloh, mengatakan, pembahasan pengurangan uang saku jamaah haji 2020 itu didasarkan pada penambahan jumlah atau jatah *katering* makan jamaah selama berada di Tanah Suci, Makkah dari 40 kali menjadi 50 kali. Pe-

nambahan jatah makan jamaah selama di Makkah pada Musim Haji 2020, kata dia, tentu akan menambah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Agar besaran BPIH 2020 tak mengalami lonjakan, Kemenag sedang membahas kemungkinan untuk mengurangi uang saku jamaah. "Sedang dalam proses pembahasan, dengan pertimbangan karena pemberian konsumsi di Makkah semula 40 kali menjadi 50 kali," ujar Maman kepada *Republika*, Rabu (15/1). Kemenag sedang mengupayakan agar rata-rata besaran BPIH 2020

minimal sama dengan 2019, yakni sebesar Rp 35.235.602.

Meski begitu, kata Maman, penentuan BPIH 2020 tergantung pada hasil rapat dengar pendapat dan rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI serta beberapa faktor lainnya. Selain itu, lanjut dia, besaran BPIH juga tergantung pada masukan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebab, besaran BPIH akan disesuaikan dengan nilai manfaat yang diperoleh BPKH.

Jika perolehan nilai manfaat itu besar, BPIH 2020 kemung-

kinan tidak naik. Namun, jika tidak terlalu besar, kata Maman, itu bisa berdampak pada pengurangan hal lainnya, seperti uang saku jamaah. Ia juga menambahkan, penentuan BPIH juga bisa dipengaruhi oleh harga tiket pesawat, harga avtur serta nilai tukar dolar AS. Tak hanya itu, penetapan BPIH juga tergantung hasil survei harga hotel, *katering*, dan transportasi di Arab Saudi.

Mantan komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Syamsul Ma'arif menyambut baik rencana Kemenag untuk memangkas uang saku jamaah haji 2020 dari sebesar 1.500 riyal menjadi 1.000 riyal. Bahkan, Syamsul menilai, *living cost* untuk jamaah sebesar 1.000 riyal pun masih terlalu besar.

"1.000 (Riyal) itu masih banyak, 750 (Riyal)-lah. Itu persiapan untuk bayar Dam saja buat yang ngambil haji *tammatu*," kata Syamsul saat dihubungi *Republika*, Rabu (15/1).

Menurut Syamsul, pada prinsipnya, *living cost* disediakan untuk biaya hidup jamaah selama berada di Makkah dan Madinah. Namun, karena saat ini makan

atau *katering* selama berada di Tanah Suci telah disediakan hampir sepenuhnya oleh Pemerintah, sudah seharusnya dana *living cost* dipangkas.

"Makan sudah ditanggung pemerintah, hanya mungkin beberapa hari saja menjelang wukuf itu. Oleh karena itu, ya secara otomatis mestinya *living cost* itu ya ditiadakan atau paling tidak, kalau ada hanya untuk pembayaran Dam. Bahkan, saya berikan masukan, sering, agar Dam dikoordinir pemerintah sekaligus," ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penetapan BPIH 2020 akan dilakukan pada awal Februari 2020 setelah rapat dengar pendapat dan rapat kerja antara Kemenag dan Komisi VIII DPR bersama BPKH. Pada 15-17 Januari 2020 akan dilakukan konsinyasi membahas BPIH. Kemudian, pada 18 Januari 2020, ada kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk survei dan meninjau kesiapan penginapan, *katering*, transportasi, dan lainnya. Pada 2 Februari pemerintah dan DPR akan menetapkan besaran BPIH 2020.

■ mabrurh ed: heri ruslan

# Ikadi: Khatib Bersertifikat Belum Perlu

JAKARTA — Rencana Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia (IK DMI) untuk melahirkan khatib bersertifikat mendapat tanggapan dari Ikatan Dai Indonesia (Ikadi). Ketua Umum Ikadi Prof Ahmad Satori Ismail menilai, sertifikat bagi khatib belum perlu dilakukan.

Namun, menurut Prof Ahmad Satori, jika DMI ingin menyamakan standar para khatib, hal tersebut sah-sah saja dilakukan. "Kalau DMI ingin mengadakan sertifikat bagi khatib, saya kira mereka punya kebebasan sendiri, tapi *kan* ada peraturan yang kaitannya dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," ujarnya saat dihubungi *Republika*, Rabu (15/1).

Menurut dia, fungsi atau tugas khatib adalah menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat. Salah satunya yang rutin adalah memberikan khutbah saat shalat Jumat. Saat ini, kata dia, untuk wilayah Jakarta saja dibutuhkan ratusan khatib, belum lagi se-Indonesia.

Untuk melakukan sistem dan mekanisme profesi khatib bersertifikat, kata Prof Ahmad Satori, dibutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Proses ini, lanjut dia, merupakan pekerjaan yang besar dan memerlukan biaya.

Ia juga mengingatkan perihal penggunaan atau *end user* dari khatib. Masyarakat sebagai yang membutuhkan khatib, kata dia, apakah bisa memastikan akan menggunakan khatib yang memiliki sertifikat tersebut. "Ini perlu

dipikirkan lagi. Jangan sampai seperti dai-dai yang distandardisasi oleh MUI Pusat. Yang tidak dipakai ya tetap begitu, sementara yang laris ya tetap laris," ungkapnya.

Prof Ahmad Satori menilai, umat Islam sudah bisa memilih dan memilah apa yang mereka butuhkan. Termasuk, memilih khatib atau dai yang dianggap berkompeten dan memiliki ilmu di bidangnya. Ia juga menyebut, tidak sembarang orang bisa menjadi khatib. Ada syarat atau ketentuan yang harus dimiliki bila ingin menjadi khatib. Aturan ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Rasulullah SAW menyebut, untuk menjadi khatib, dalam khutbah yang disampaikan ada rukun-rukun yang ha-

rus diikuti. Di antaranya ada bacaan *hamdalah*, shalawat, syahadat, serta doa-doa.

"Khatib itu berarti orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Dan, di dalam khutbahnya berisikan nasihat. Sejak dulu, khatib itu bukan yang bersertifikat, melainkan siapa yang paling bertakwa, paling saleh karena dia nanti akan memberikan nasihat kepada jamaah. Makanya, dulu Rasul juga sering menjadi khatib dan imam," kata dia.

Wacana sertifikat profesi bagi khatib muncul setelah pengurus Ikatan Khatib DMI bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin Selasa (14/1). Ketua Umum IK DMI Hamdan Rasyid menyebut, sistem ini bertujuan untuk membuat ukuran standar bagi para khatib.

"Ada ukuran yang harus dipenuhi untuk sistem khatib bersertifikat. Mulai dari fikih, yakni rukun-rukun khutbah, bacaan Alquran harus fasih, hingga materi dakwah yang disampaikan," ujarnya saat itu.

Ia juga menegaskan, khatib tidak sama dengan penceramah biasa. Ada spesifikasi khusus yang harus dipenuhi oleh khatib. Diperlukan rukun-rukun tertentu dan kompetensi.

Dengan adanya sistem khatib bersertifikat, ia berharap, dapat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat atas kehadiran khatib. Khatib bersertifikat bisa menutup peluang keraguan akan materi khutbah yang disampaikan.

■ zahrotul oktavianied: heri ruslan

# KUII VII Perlu Memberi Perhatian pada Dakwah Medsos

● UMAR MUKHTAR

JAKARTA — Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII yang akan digelar di Bangka Belitung pada 26-29 Februari 2020 dinilai perlu memberi perhatian secara khusus pada media sosial (medsos). Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Prof Abdurrahman Mas'ud Kaban mengatakan, dakwah yang memuat moderasi beragama perlu dimasifkan di medsos.

"Dakwah *sosmediyah* seperti ini masih sangat kecil di kita. Kita masih kalah dengan hal-hal yang bersifat radikal," ujarnya se usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Arah Baru Kehidupan Keagamaan Umat Islam Indonesia di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (15/1).

Prof Mas'ud menilai, generasi muda yang saat ini menjadi mayoritas harus menjadi pelaku utama dan juga target.

"Ini perlu dan *enggak* bisa dilakukan oleh NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah saja, kita ini hanya sebagai pendorong untuk lahirnya generasi Islam yang santun dan toleran."

Menurutnya, perlu dibuat agenda dakwah digital, terutama bagi kalangan milenial-muda yang menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia saat ini. "Gunakan bahasa mereka. *Khaatibinnaas bi qadri uquulihim*, misalnya melalui medsos itu," ungkapnya.

Beragama dengan ilmu, lanjut Prof Mas'ud, harus menjadi *habbit* atau *style*. Majelis taklim untuk para orang tua atau dewasa dan pengajian anak harus digalakkan. Para ustaz dan guru mengaji harus tersebar secara merata hingga ke semua lapisan kalangan. "Termasuk juga kelas atas seperti artis. Kolaborasi dengan pemerintah atau Kementerian Agama dalam penyediaan guru atau ustaz penyuluh agama yang

dibutuhkan," kata dia.

Ia mengatakan, isu yang perlu dikedepankan adalah pengembangan ekonomi umat, yakni isu yang lintas ormas dan jauh dari perdebatan *furu'iyah* (persoalan yang bersifat cabang, bukan prinsip) dan tendensi politis.

Pihaknya juga berharap, KUII VII juga perlu menyuarakan tentang pengarusutamaan kebinekaan dan moderasi beragama. "Gelorakan kembali konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basariyah," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Abdullah Jaidi, menuturkan, KUII VII yang digelar akhir Februari 2020 tidak sekadar kongres, tetapi KUII melihat dan mengkaji kondisi keumatan sekarang ini untuk menemukan solusi alternatif.

"Bagaimana masyarakat umat di *grassroot* itu, apa yang diharapkan, tentang banyak hal. Maka, kami juga mengadakan pertemuan di FGD (*Focus Group Discussion*). Seperti misalnya, berbagai permasalahan ekonomi," ujarnya, Rabu (15/1).

Menurut Kiai Jaidi, persoalan yang penting disoroti pada KUII 2020, yakni masalah ekonomi. Berbagai narasumber yang dihadirkan pada FGD sebagai rangkaian acara menuju Kongres pun mengutarakan tentang pentingnya perekonomian umat Islam.

"Ekonomi yang sekarang ini menjadi masalah penting. Bahwa masalah kita ini yang terpenting adalah masalah ekonomi, tapi mustahil kita upayakan bersama kalau tidak punya sifat-sifat atau perilaku-perilaku kebersamaan," tutur dia. Upaya membangun kebersamaan itu, lanjut Kiai Jaidi, di antaranya dapat dilakukan dengan saling berkomunikasi, saling bersilaturahmi, dan tidak melihat pandangan yang bersifat khilafiyah.

"Tapi, melihat masalah yang lebih besar, masalah keumatan yang menjadi fokus kita saat ini," kata Ketua Dewan Syuro al-Irsyad al-Islamiyah itu. Selain masalah ekonomi, kata dia, KUII juga menyoroti bagaimana merajut kebersamaan dalam konteks berbangsa dan bernegara. "Jadi, kita harus menyingkirkan hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah khilafiyah, tapi kita harus merajut bagaimana menyatukan pandangan umat atas berbagai permasalahan umat."

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Anwar Abbas menambahkan, KUII 2020 harus menyadarkan tentang titik lemah umat Islam saat ini. KUII juga harus menentukan arah tujuan umat Islam. "Kita harus jadi penentu karena sekarang ini belum. Kita harus bisa mewarnai kehidupan politik dengan nilai-nilai agama," ungkapnya.

■ ed: heri rustan